PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENDIDIKAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2021

disdi

2021



JL. CUT NYAK DIEN NO. 3 PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2020 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Renstra tahun 2019-2024. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2021, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2019-2024 Dinas Pendidikan.

Tahun 2021 Dinas Pendidikan melaksanakan enam program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2020. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai

bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Dr. H.KAMSOL
Pembina Utama Madya
NIP.19650314 199403 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 STRUKTUR ORGANISASI 1

1.3 TUGAS DAN FUNGSI 10

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 11

1.5 PERMASALAHAN UTAMA 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024 14

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 18

3.2 REALISASI ANGGARAN 52

BAB IV PENUTUP 54

4.1 KESIMPULAN UMUM 54

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS 55

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.1	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan	9
1.2	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan	9
1.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	10
1.4	Identifikasi Permasalahan Pendidikan	12
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	15
2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021	17
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	19
3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	19
3.3	Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	21
3.4	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021.....	21
3.5	APM Sekolah Menengah Sederajat se Provinsi Riau Tahun 2021.....	23
3.6	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2021.....	24
3.7	Angka Putus sekolah se Provinsi Riau Tahun 2021.....	25
3.8	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2021	26
3.9	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2021.....	27
3.10	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 se Provinsi Riau Tahun 2021.....	28
3.11	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B se Provinsi Riau Tahun 2021	30
3.12	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B se Provinsi Riau Tahun 2021.....	30
3.13	Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Se - Provinsi Riau Tahun 2021	32
3.14	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	33
3.15	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	34

3.16	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	35
3.17	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah	35
3.18	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	36
3.19	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sekolah SMA Yang Berakreditasi Minimal B	37
3.20	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	37
3.21	Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau	38
3.22	Realisasi KInerja Tahun ini dengan Standar Nasional APK	41
3.23	Realisasi KInerja Tahun ini dengan Standar Nasional APM	42
3.24	Realisasi Kinerja dan Anggaran	48
3.25	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.26	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
3.27	Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Pendidikan Provinsi Riau	52
4.1	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau	8

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
3.1	APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021.....	22
3.2	APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021.....	24
3.3	Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021.....	26
3.4	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun.....	28
3.5	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021	31
3.6	Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021	32
3.7	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APK	41
3.8	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional APK.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

2 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Provinsi Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan Program

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah; dan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus.
f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
g. Cabang Dinas.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)
6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

1.2.2 Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan**.**
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, peLaksanaan evaluasi dan pelaporan, peleksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.
3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencaaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
   b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

5. Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program.
   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/ kegiatan dari masing masing bidang.
   d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
   e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
   f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
   g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program dan;
   h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
6. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah.
   c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
   d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
   f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
   g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.

h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi.
j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungJawaban anggaran.
k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.
i. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Mempunyai Tugas :
   a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
   d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian.
   e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
   f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
   g. Membuat laporan perkembangan kepengawaian.
   h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
   i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
   j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanaan dinas.
   k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
   l. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
   m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
   n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum dan

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
   a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :
      - penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
      - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
      - menyusun bahan perumusan koordinasi pencapaian kurikulum, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas.
      - menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas.
      - penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
      - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
   a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.
      - penyusunan prograrn kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
      - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
      - menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan

pembangunan karakter peserta didik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.

- menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan.
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

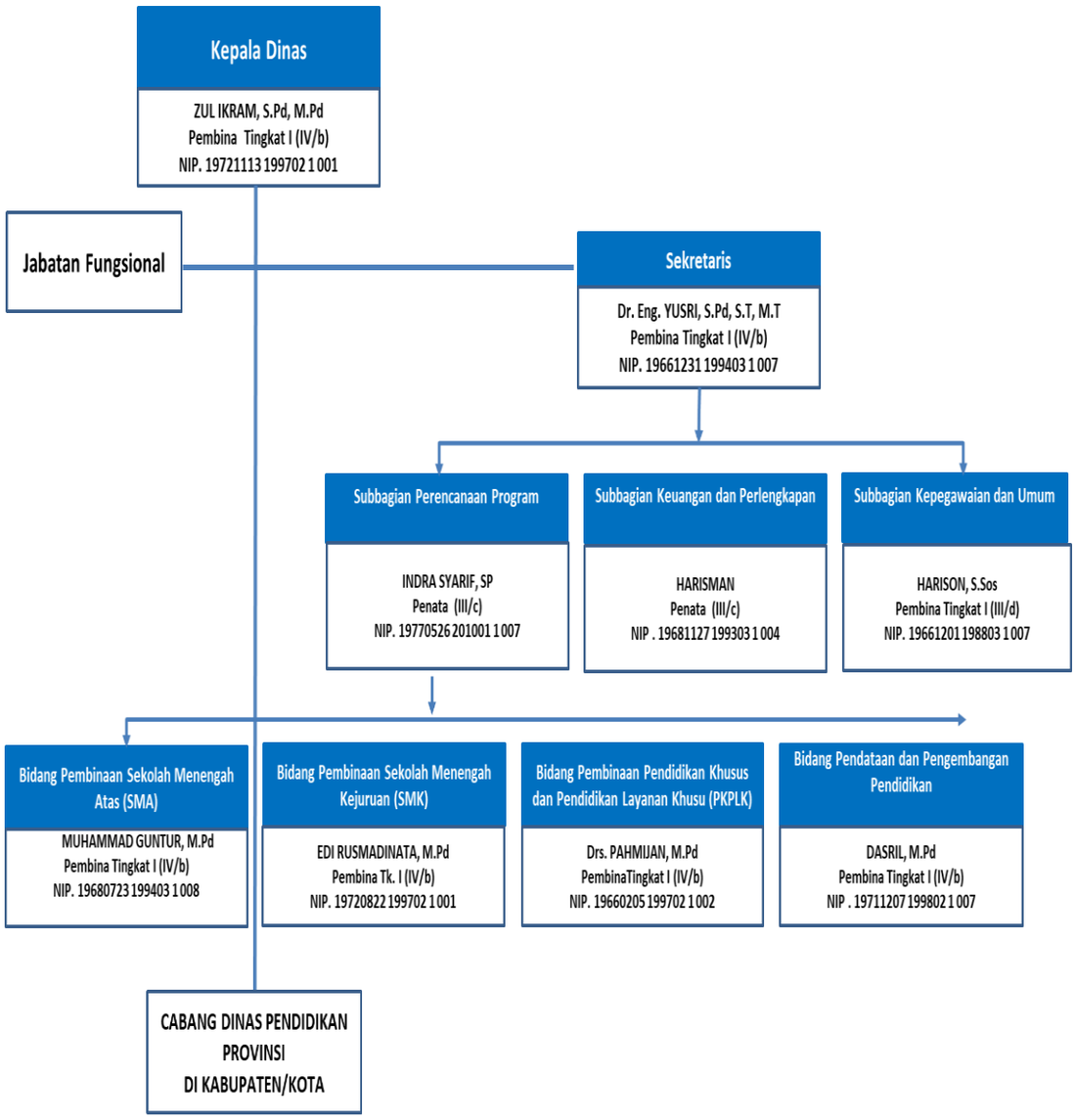
a. Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan menyelenggaraan fungsi;

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan pendidikan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah pelaksanaan kebijakan pengelola data pendidikan, Pengembangan Kebijakan pendidikan dan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melakukan penyebarluasan informasi dan pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- menyusun kalender pendidikan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

1.2.3 Gambar Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



1.2.4 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 7.612 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN						
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH
		I	II	III	IV			
1	Laki-laki		1	8	11	20	2.624	2.664
2	Perempuan			1	4	5	4.963	4.968
TOTAL PNS						25	7.587	7.612

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 7.612 orang, dan Jabatan Struktural sebanyak 25 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN									
		TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SMP	SMA SEDERAJAT	D-I	D-II	D-III	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	6	11	158	2	1	44	1958	461	3	2644
2	Perempuan		4	200	4	4	52	4197	504	3	4968
TOTAL PNS		6	15	358	6	5	96	6155	965	6	7612

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata 1 (S.1) yang berjumlah 6.155 orang dan SMA Sederajat berjumlah 358 orang. Jika dilihat dari PNS yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 971 orang dari seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

Tabel 1.3
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN I				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	19	157	1584	885	2645
2	Perempuan	2	180	3263	1522	4967
TOTAL PNS		**19**	**337**	**4847**	**2407**	**7612**

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 4.847 atau sedang golongan terkecil adalah golongan I yang berjumlah 19 orang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan
   d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah kejuruan, Bidang

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Masih adanya Kesenjangan Aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat di daerah ataupun di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kesulitan menjangkau lokasi pendidikan dan rendahnya kemampuan ekonomi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Masih adanya Kesenjangan Kualitas pendidikan antara perkotaan dengan di daerah. Hal ini disebabkan perbedaan ketersediaan fasilitas pendidikan dan belum meratanya penyebaran guru dan Penerapan kurikulum 2013 yang belum maksimal
3. Belum terdapatnya kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarpras pendidikan menengah terutama kejuruan
5. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai
6. Terbatasnya jumlah tenaga pendidik.

1.5 PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 Tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terkait dengan pencapaian layanan pendidikan, melihat hasil pencapaian tahun sebelumnya di identifkasi permasalahan sebagai berikut :

1. Aksesibilitas Pendidikan
2. Kualitas Tenaga Pendidikan
3. Mutu Pendidikan dan Relevansi Pendidikan

Identifikasi permasalahan Pendidikan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Pendidikan

NO	MASALAH POKOK (Tujuan & Sasaran)		MASALAH (Strategi)		AKAR MASALAH (Arah Kebijakan)
1	Belum Terwujudnya Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun				
1.1	Masih Rendahnya Aksesibilitas terhadap Pelayanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1.	Masih Rendahnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	Masih kurangnya Sarana dan prasarana Pendidikan
				-	Sarana dan prasarana Pendidikan yang tidak merata
				-	Masih Banyaknya Sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
				-	Masih terbatasanya jangkauan terhadap layanan pendidikan
		2.	Keterjangkauan dalam mendapatkan layananan pendidikan masih sulit	-	Belum terpenuhinya kebutuhan operasional penyelenggaran Pendidikan
				-	Masih Adanya Siswa Miskin yang tidak dapat melanjutkan Sekolah
				-	Masih adanya Biaya-biaya Lain pada Sekolah (yang dibebankan kepada Peserta Didik)
				-	Jarak Sekolah dengan Pemukiman yang relatif jauh
1.2	Masih Rendahnya Kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan	1.	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih Rendah	-	Kualifikasi Guru dibawah D-IV / S-1
				-	Rendahnya Kualitas / Kompetensi Tenaga Pendidik
1.3	Masih rendahnya Mutu dan Relevansi Pendidikan bagi peserta didik	a.	Keterbatasan Penyediaan Fasilitas Belajar siswa	-	Media Pembelajaran Siswa yang masih belum terpenuhi
				-	Alat Praktek dan Alat labor yang masih belum terpenuhi

		b.	Rendahnya Kompetensi Dasar yang dimiliki oleh peserta Didik	-	Rendahnya kemampuan pemahaman akademik bagi peserta didik
		c.	Ketidaksesuaian Pendidikan Kejuruan dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	-	Kurangnya / tidak ada sikronisasi kurikulum SMK dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
				-	Payung Hukum / sangsi terhadap perusahaan yang tidak respon baik dengan pihak SMK / Pemerintah
				-	Kurang terpenuhinya sertifikasi profesi bagi peserta didik SMK dari Lembaga Sertifikasi Profesi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau merubah RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas Pendidikan membuat Renstra untuk Periode Tahun 2019-2024.

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2020-2024

Tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau antara lain:

1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

   Untuk merealisasikan misi Kepala Daerah, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2019-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi Kepala Daerah.

1.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis Dinas Pendidikan tahun 2019-2024 adalah **"Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun"**.

Adapun Indikator program Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut :

- Rata-Rata Lama Sekolah
- Harapan Lama Sekolah

1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Riau (2019-2024)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024. **Sasaran strategis** Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:
     1) APK SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     2) APM SMA/MA/SMALB/Paket C (%)
     3) Angka Putus Sekolah
2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK).
   - Adapun Indikator Sasaran/ kinerja adalah sebagai berikut :
     - Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1
3. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik.
   - Adapun Indikator Sasaran/kinerja adalah sebagai berikut:
     1) Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
     2) Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun			1	Rata-rata Lama Sekolah	8,97	9,04	9,11	9,18	9,24
				2	Harapan Lama Sekolah	13,57	13,74	13,92	14,10	14,28
		1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	85,56	85,86	86,16	86,46
				2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	62,59	63,09	63,09	64,09
				3	Angka Putus Sekolah	1,01	1,00	0,9	0,8	0,7

		2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	95,94	96,44	96,94	97,44
		3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	82,83	83,03	83,23	83,43
				2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	55,03	55,23	55,43	55,63

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2019-2024 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Disdik telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 1.084.849.051.821,00	APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 1.093.129.230.556,00	APBD
3	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 641.032.460,00	APBD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1. APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56
		2. APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59
		3. Angka Putus Sekolah	1,01
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94
3	Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,83
		2. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,03

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas pendidikan Provinsi Riau selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56	88,91	103,92
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48
		3	Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96.00	100,06
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,68	104,65
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,03	81,43	147,97

3.1.1.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2021 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/PaketC.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/SMLB/Paket C;
3. Angka Putus Sekolah

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat

Indikator APK SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.3
Target, Realisasi, Dan Capaian Kinerja
APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56	88,91	103,92

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU "APK Provinsi SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C".

Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 103,92% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2021 berhasil dicapai.

Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APK SMA/SMK/SMLB/ Paket C Provinsi Riau tahun 2021 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

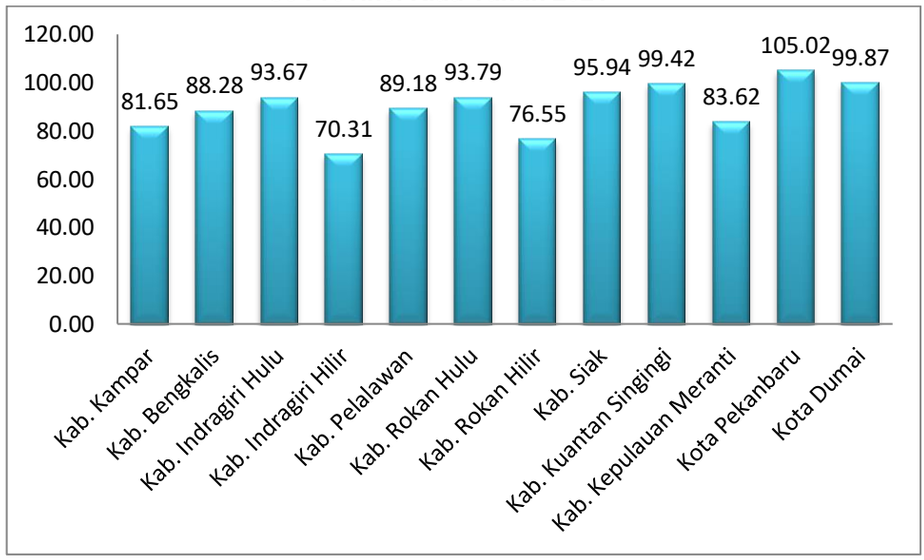
Tabel 3.4
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	46.912	38.304	81,65
2	Kab. Bengkalis	37.147	32.792	88,28
3	Kab. Indragiri Hulu	22.855	21.409	93,67
4	Kab. Indragiri Hilir	41.033	28.849	70,31
5	Kab. Pelalawan	19.479	17.371	89,18
6	Kab. Rokan Hulu	28.204	26.452	93,79
7	Kab. Rokan Hilir	44.926	34.391	76,55
8	Kab. Siak	25.619	24.578	95,94
9	Kab. Kuantan Singingi	16.489	16.394	99,42
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.774	9.009	83,62

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
11	Kota Pekanbaru	59.875	62.878	105,02
12	Kota Dumai	15.587	15.567	99,87
	Provinsi Riau	**368.900**	**327.994**	**88,91**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 3.1
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota
Se Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Tabel 3.4 dan grafik 3.1 tersebut menunjukkan ada 5 (lima) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kampar (81,65%), Kabupaten Bengkalis (88,28%), Kabupaten Indragiri Hilir (70,31%), Kabupaten Rokan Hilir (76,55%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (83,62%) dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan capaian tertinggi adalah Kota Pekanbaru (105,02%). Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak

penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C Usia } 16-18 \text{ Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } 16-18 \text{ Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16–18 Tahun. Indikator APM SM Sederajat diperoleh dengan cara membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, tahun 2021 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 243.544 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 368.900 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 66,02%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
APM Sekolah Menengah Sederajat
se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapainya tujuan mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU “APM Provinsi SMA/MA/SMK/SMLB/ Paket C”.

Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 105,48% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa

sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2021 berhasil dicapai.

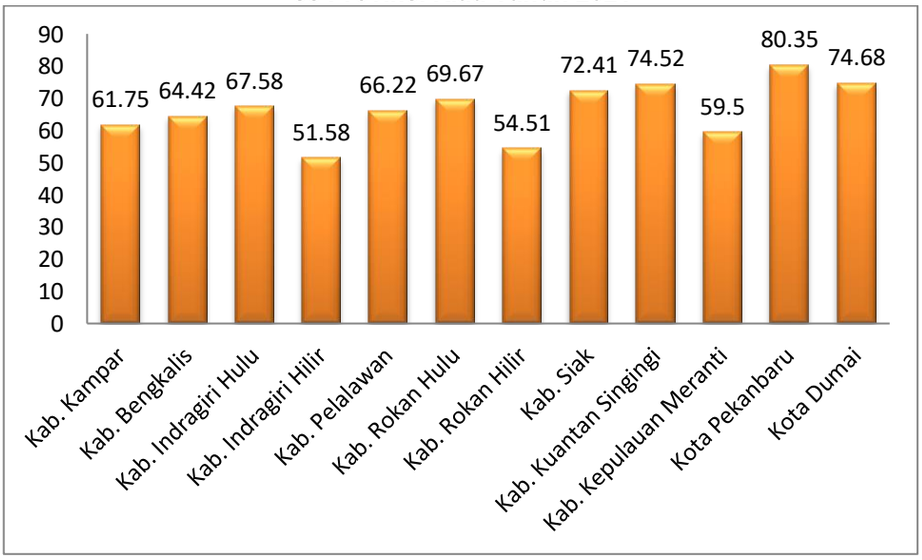
Berikut pencapaian APM SMA/SMK/SMLB/Paket C Provinsi Riau tahun 2021 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.6
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jumlah siswa Usia 16-18 Tahun	APM %
1	Kab. Kampar	46.912	28.967	61,75
2	Kab. Bengkalis	37.147	23.929	64,42
3	Kab. Indragiri Hulu	22.855	15.446	67,58
4	Kab. Indragiri Hilir	41.033	21.164	51,58
5	Kab. Pelalawan	19.479	12.899	66,22
6	Kab. Rokan Hulu	28.204	19.650	69,67
7	Kab. Rokan Hilir	44.926	24.489	54,51
8	Kab. Siak	25.619	18.551	72,41
9	Kab. Kuantan Singingi	16.489	12.288	74,52
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.774	6.411	59,50
11	Kota Pekanbaru	59.875	48.110	80,35
12	Kota Dumai	15.587	11.640	74,68
	Provinsi Riau	**368.900**	**243.544**	**66,02**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.2
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.6 dan grafik 3.2 tersebut diatas terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APM SM Sederajat berada jauh di

bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Kampar (61,75%), Kabupaten Bengkalis (64,42%), Kabupaten Indragiri Hilir (51,58%), Kabupaten Rokan Hilir (54,51%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (59,50%) dengan capaian APM terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan realisasi capaian APM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru (80,35%).

3. Angka Putus Sekolah.

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 16-18 tahun tingkat SMA sederajat.

APtS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK}}{\text{Jumlah seluruh siswa SMA/SMK}} \text{ X } 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Angka Putus sekolah se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 106,38% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada tahun 2021 berhasil dicapai.

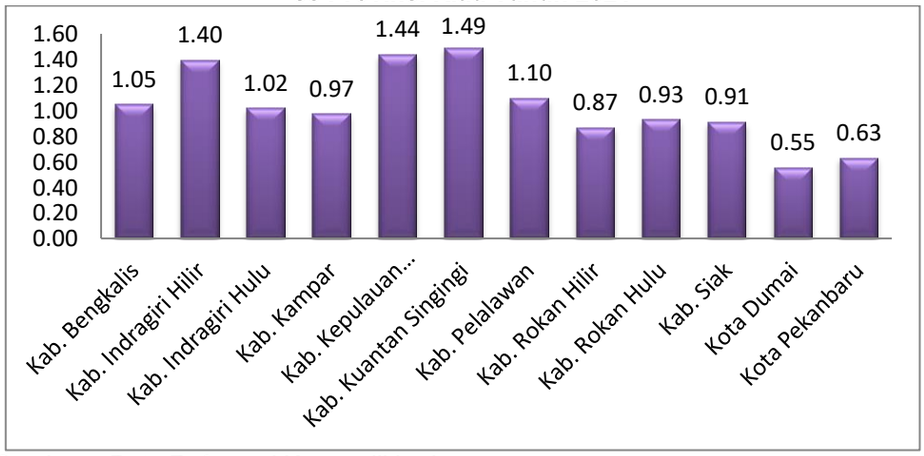
Berikut pencapaian angka partisipasi kasar APM SMA/SMK/SMLB/ Paket C Provinsi Riau tahun 2021 terlihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.8
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2021

NO	Kabupaten	Jumlah siswa putus sekolah	Jumlah siswa keseluruhan	Persentase siswa putus sekolah
1	Kab. Bengkalis	291	27.826	1,05
2	Kab. Indragiri Hilir	261	18.695	1,40
3	Kab. Indragiri Hulu	180	17.664	1,02
4	Kab. Kampar	279	28.761	0,97
5	Kab. Kepulauan Meranti	91	6.321	1,44
6	Kab. Kuantan Singingi	200	13.431	1,49
7	Kab. Pelalawan	169	15.416	1,10
8	Kab. Rokan Hilir	236	27.248	0,87
9	Kab. Rokan Hulu	209	22.544	0,93
10	Kab. Siak	191	20.993	0,91
11	Kota Dumai	78	14.169	0,55
12	Kota Pekanbaru	344	54.759	0,63
	Total	**2.529**	**267.827**	**0,94**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.3
Angka Putus Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APtS SM Sederajat berada jauh di atas rata-rata APtS Provinsi yaitu Kabupaten Bengkalis (1,05%), Kabupaten Indragiri Hilir (1,40%), Kabupaten Indragiri Hulu (1.02%), Kabupaten Kampar (0,92%), Kabupaten Kepulauan Meranti (1,44%), Kabupaten Kuantan Singingi (1,49%) dan Kabupaten Pelalawan (1,10%) dengan capaian APtS tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan capaian APtS terendah adalah Kota Dumai (0,55%).

B. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dalam meningkatkan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan, untuk mengetahui kualitas pendidikan dan kualitas lulusan Siswa di Provinsi Riau. Guru merupakan komponen penting dan dianggap memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan pendidikan. Tinggi rendahnya atau baik buruknya kualitas pembelajaran di suatu Sekolah bergantung dan sangat ditentukan oleh peranan kinerja Guru. Masih rendahnya kinerja guru tidak terlepas dari masalah Kualifikasi, baik Kualifikasi akademik maupun kualifikasi non Akademik masih banyak guru yang memiliki kualifikasi di bawah standar/S1.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1.

Adapun target dan pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 dapat dijelaskan bahwa pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Menengah, dicapai melalui Program Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga Kependidikan, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Guru Kualifikasi Pendidikan min S1/D4 SMA/SMK}}{\text{Jumlah Keseluruhan Guru SMA/SMK}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1
se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96,00	100,06

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 100,06% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikanpada tahun 2021 berhasil dicapai.

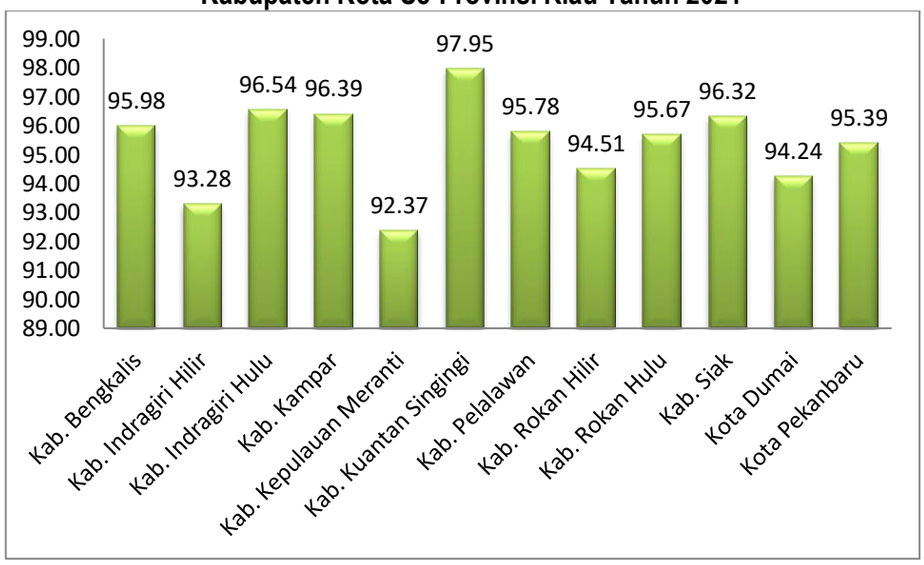
Berikut pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Provinsi Riau tahun 2021 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.10
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan S2 se Provinsi Riau Tahun 2021

NO	Kabupaten	Jumlah Guru Kualifikasi Pendidikan min S1 dan S2 SMA dan SMK	Jumlah Guru SMA dan SMK	Persentase Guru Kualifikasi Pendidikan min D4/S1
1	Kab. Bengkalis	1.959	2.041	95,98
2	Kab. Indragiri Hilir	1.263	1.354	93,28
3	Kab. Indragiri Hulu	1.172	1.214	96,54
4	Kab. Kampar	2.163	2.244	96,39
5	Kab. Kepulauan Meranti	545	590	92,37
6	Kab. Kuantan Singingi	1.145	1.169	97,95
7	Kab. Pelalawan	1.089	1.137	95,78
8	Kab. Rokan Hilir	1.686	1.784	94,51
9	Kab. Rokan Hulu	1.614	1.687	95,67
10	Kab. Siak	1.413	1.467	96,32
11	Kota Dumai	884	938	94,24
12	Kota Pekanbaru	3.660	3.837	95,39
	Total	18.593	19.462	96,00

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari table 3.10 dan grafik 3.4 tersebut diatas terdapat 8 (delapan) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 Provinsi yaitu

Kabupaten Bengkalis (95,98%), Kabupaten Indragiri Hilir (93,28%), Kabupaten Kepulauan Meranti (92,37%), Kabupaten Pelalawan (95,78%), Kabupaten Rokan Hilir (94,51%), Kabupaten Rokan Hulu (95,67%), Kota Dumai (94,24%) dan Kota Pekanbaru (95,39%) dengan capaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sedangkan capaian yang tertinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi (97,95%).

C. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: I) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi di lakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Sejalan dengan hal di atas, dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 50 dinyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan; 3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh : (a) Pemerintah Pusat; dan/atau, (b) lembaga mandiri. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu :

1. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
2. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

Indikator Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah SMA yang berakreditasi Meninimal B}}{\text{Jumlah Sekolah SMA}} X\ 100\%$$

Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
se Provinsi Riau Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1 m b e r	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,68	104,65

sumber: Data Referensi Kemendikbud

Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 104,65% dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik pada tahun 2021 berhasil dicapai.

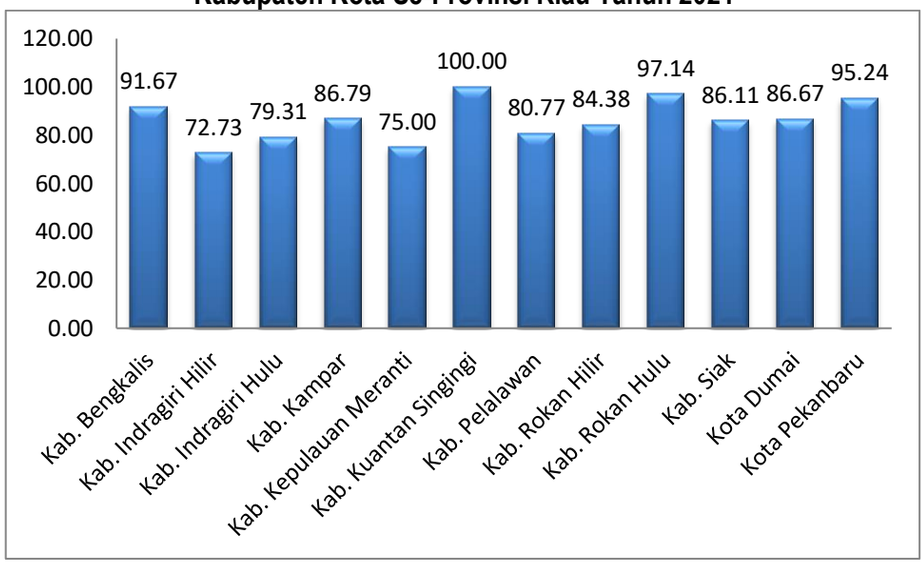
Adapun pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau tahun 2021 terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.12
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
se Provinsi Riau Tahun 2021

NO	Kabupaten	Jumlah SMA yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah SMA	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
1	Kab. Bengkalis	44	48	91,67
2	Kab. Indragiri Hilir	32	44	72,73
3	Kab. Indragiri Hulu	23	29	79,31
4	Kab. Kampar	46	53	86,79
5	Kab. Kepulauan Meranti	18	24	75,00
6	Kab. Kuantan Singingi	21	21	100,00
7	Kab. Pelalawan	21	26	80,77
8	Kab. Rokan Hilir	54	64	84,38
9	Kab. Rokan Hulu	34	35	97,14
10	Kab. Siak	31	36	86,11
11	Kota Dumai	13	15	86,67
12	Kota Pekanbaru	60	63	95,24
	Total	**397**	**458**	**86,68**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.5
Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.12 dan grafik 3.5 tersebut diatas terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (72,73%), Kabupaten Indragiri Hulu (79,31%), Kabupaten Kepulauan Meranti (75,00%), Kabupaten Pelalawan (80,77%), Kabupaten Rokan Hilir (84,38%), Kabupaten Siak (86,11%), Kota Dumai (86,67%). dengan capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B paling rendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir (72,73%) sedangkan capaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B paling tinggi adalah Kabupaten Kuantan Singingi (100%).

2. Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah Sekolah SMK}} X\ 100\%$$

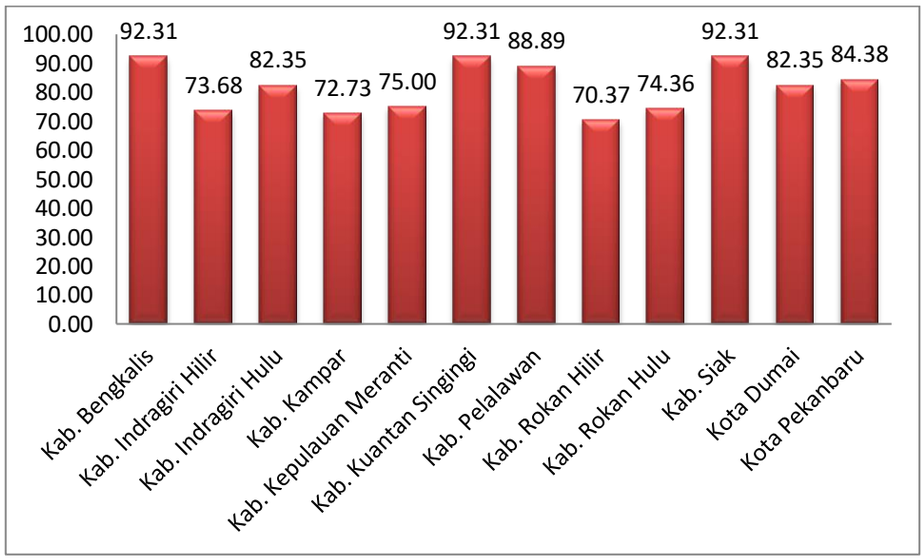
Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
Se - Provinsi Riau Tahun 2021

NO	Kabupaten	Jumlah program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah SMK	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
1	Kab. Bengkalis	24	26	92,31
2	Kab. Indragiri Hilir	14	19	73,68
3	Kab. Indragiri Hulu	14	17	82,35
4	Kab. Kampar	24	33	72,73
5	Kab. Kepulauan Meranti	6	8	75,00
6	Kab. Kuantan Singingi	12	13	92,31
7	Kab. Pelalawan	16	18	88,89
8	Kab. Rokan Hilir	19	27	70,37
9	Kab. Rokan Hulu	29	39	74,36
10	Kab. Siak	24	26	92,31
11	Kota Dumai	14	17	82,35
12	Kota Pekanbaru	54	64	84,38
	Total	**250**	**307**	**81,43**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.6
Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B
Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2021



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.13 dan grafik 3.6 tersebut diatas terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang realisasi/capaian Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B berada jauh di bawah rata-rata Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir (73,68%), Kabupaten Kampar (72,73%), Kabupaten

Kepulauan Meranti (75,00%), Kabupaten Rokan Hilir (70,37%) dan Kabupaten Rokan Hulu (74,36%) dengan capaian Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B paling rendah adalah Kabupaten Rokan Hilir sedangkan capaian Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B tertinggi adalah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Siak dengan capaian masing-masing sebesar 92,31%.

3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel. 3.14
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2020			Tahun 2021		
				Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja	Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,26	86,65	101,63	85,56	88,91	103,92
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,09	66,86	107,68	62,59	66,02	105,48
		3	Angka Putus Sekolah	1,01	0,76	132,89	1,00	0,94	106,38
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,44	96	100,59	95,94	96,00	100,06
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,63	86,5	104,68	82,83	86,68	104,65
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	54,83	81,19	148,08	55,03	81,43	147,97

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan 3

(tiga) indikator pendukung yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C dan Angka Putus Sekolah. Realisasi kinerja tahun 2020 APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 86,65% dengan Target 85,26% sehingga capaian kinerja 101,63% sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi Kinerja APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 88,91% dengan Target 85,56% sehingga capaian kinerja 103,92%. Realisasi kinerja Tahun 2020 APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C sebesar 66,86% dengan Target 62,09% sehingga capaian kinerja 107,68% sedangkan untuk tahun 2021 Realisasi Kinerja sebesar 66,02% dengan Target 62,59% sehingga capaian kinerja 105,48%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah sebagai berikut :

a. APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian angka partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.15
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APK SM Sederajat	77,97	81,39	82,54	86,65	88,91

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.15 diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Kasar SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2017 sebesar 77,97%, tahun 2018 sebesar 81,39% dengan rasio peningkatan sebesar 3,42% dari tahun 2017. Realisasi untuk tahun 2020 sebesar 86,65% meningkat sebesar 4,11% dari tahun 2019 sebesar 82,54%. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 86,91% meningkat sebesar 0,26% dari tahun 2020 sebesar 86,65%.

a. APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.16
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APM SM Sederajat (Provinsi)	58,63	60,22	63,81	66,86	66,02

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel diatas tren pencapaian Angka Partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Untuk tahun 2017 sebesar 58,63%, tahun 2018 sebesar 60.22% dengan rasio peningkatan sebesar 1,59% dari tahun 2017. Realisasi untuk tahun 2020 sebesar 66,86% meningkat 3,05% dari tahun 2019 sebesar 63,81%. Realisasi untuk tahun 2021 sebesar 66,02% mengalami penurunan sebesar 0,84% dari tahun 2020 sebesar 66,86%.

b. Angka Putus Sekolah

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.17
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Angka Putus Sekolah

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Putus Sekolah	0,04	2,10	1,34	0,76	0,94

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.17 diatas trend pencapaian Angka Putus Sekolah SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2017 sebesar 0,04%, tahun 2018 sebesar 2,10% dengan rasio peningkatan sebesar 2,06% dari tahun 2017. Realisasi Angka Putus Sekolah untuk tahun 2019 sebesar 1,34%, tahun 2020 sebesar 0,76% dengan rasio peningkatan sebesar 0,58% dari tahun 2019. Di Tahun 2021 Angka Putus Sekolah naik kembali menjadi sebesar 0,94%, tahun 2020 sebesar 0.76% dengan rasio kenaikan sebesar 0.18%. Indikator Angka Putus Sekolah semakin kecil semakin baik dalam mencerminkan partisipasi sekolah siswa dan meningkatan akses pendidikan menengah.

2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1.

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.18
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi S1 dan S2

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	94,97	95,92	96,00	96,00	96,00

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.18 diatas tren pencapaian Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pencapaian/tetap setiap tahunnya. Realisasi Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk tahun 2017 sebesar 94,97%, tahun 2018 sebesar 95,92% dengan rasio peningkatan sebesar 0,95% dari tahun 2017. Realisasi Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 96,00% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 0,08%. Di Tahun 2020 dan tahun 2021 Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 tetap sebesar 96,00%.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik dengan Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B, Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

a. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.19
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase Sekolah SMA Yang Berakreditasi Minimal B

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase program keahlian SMA yang berakreditasi minimal B	72,70	81,50	86,70	86,50	86,68

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.19 diatas tren pencapaian Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pencapaian/tetap setiap tahunnya. Realisasi Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2017 sebesar 72,70%, tahun 2018 sebesar 81,50% dengan rasio peningkatan sebesar 8,80% dari tahun 2017. Realisasi Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 86,70% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 5,20%. Di Tahun 2020 Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B mengalami penurunan sebesar 86,50% dari tahun 2019 dengan rasio penurunan sebesar 0,20%. Terjadinya penurunan Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B karena ada beberapa sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta adanya penambahan jumlah sekolah swasta yang baru yang belum terakreditasi. Realisasi Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 86,68% dari tahun 2020 sebesar 86.50% dengan rasio peningkatan sebesar 0,18%

b. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan trend pencapaian Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B SM Sederajat Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel. 3.20
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	29,00	54,20	82,10	81,19	81,43

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.20 diatas tren pencapaian Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B Provinsi Riau pada 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan pencapaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Realisasi Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2017 sebesar 29,00%, tahun 2018 sebesar 54,20% dengan rasio peningkatan sebesar 25,00% dari tahun 2017. Realisasi Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 82,10% dari tahun 2018 dengan rasio peningkatan sebesar 27,90%. Di Tahun 2020 Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B mengalami penurunan sebesar 81,19% dari tahun 2019 dengan rasio penurunan sebesar 0,91%. Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal maka akreditasi Sekolah SMK tidak berdasarkan Program Keahlian lagi tetapi berdasarkan akreditasi satuan pendidikannya. Terjadinya penurunan Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B pada tahun 2020 karena ada beberapa sekolah yang masa akreditasinya berakhir dan serta adanya penambahan jumlah sekolah swasta yang baru yang belum terakreditasi. Di Tahun 2021 Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B mengalami peningkatan sebesar 81,43% dari tahun 2020 sebesar 81,19% dengan rasio peningkatan sebesar 0,24%.

3.1.3 Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tabel 3.21
Realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56	88,91	103,92
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48
		3	Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir
1	2	3		4	5	6
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96,00	100,06
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,83	86,68	104,65
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,03	81,43	147,97

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel 3.21 diatas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dengan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C dan Angka Putus Sekolah. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan capaian terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut :

   a. APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

   Indikator Kinerja APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C untuk realisasi tahun 2021 sebesar 88,91% dengan target akhir Renstra sebesar 85,56% dan capaian tahun 2021 terhadap target akhir sebesar 103,92%. Target akhir renstra tahun 2024 sudah tercapai 100%. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target indikator APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena target telah tercapai.

   b. APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

   Indikator Kinerja APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk realisasi tahun 2021 sebesar 66,02% dengan target akhir Renstra sebesar 105,48% dan capaian tahun 2021 terhadap target akhir sebesar 105,48%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target

indikator APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

c. Angka Putus Sekolah

Indikator Kinerja Angka Putus Sekolah untuk realisasi tahun 2021 sebesar 0,94% dengan target akhir Renstra sebesar 1% dan capaian tahun 2020 terhadap target akhir sebesar 106,38%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%. Jika ada perubahan/revisi Renstra Tahun 2019-2024 dapat direkomendasikan perubahan target indikator Angka Putus Sekolah untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator pendukung yaitu Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan capaian terhadap target akhir renstra. Indikator Kinerja Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 untuk realisasi tahun 2021 sebesar 96,00% dengan target akhir Renstra sebesar 95,94% dan capaian tahun 2021 terhadap target akhir sebesar 100,06%.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan capaian terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut :

a. Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B

Indikator Kinerja Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B untuk realisasi tahun 2021 sebesar 86,68% dengan target akhir Renstra sebesar 82,83% dan capaian tahun 2021 terhadap target akhir sebesar 104,65%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

b. Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B

Indikator Kinerja Persentase Program Keahlian SMK yang berakreditasi minimal B untuk realisasi tahun 2021 sebesar 81,43% dengan target akhir Renstra sebesar 55,03% dan capaian tahun 2021 terhadap target akhir sebesar 147,97%. Target akhir renstra tahun 2024 tercapai melebihi 100%, karena target telah tercapai dan penentuan target yang rendah.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Data capaian kinerja sasaran Strategis meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang dapat dibandingkan dengan Nasional adalah untuk indicator sebagai berikut:

a. APK (Angka Partisipasi Kasar)

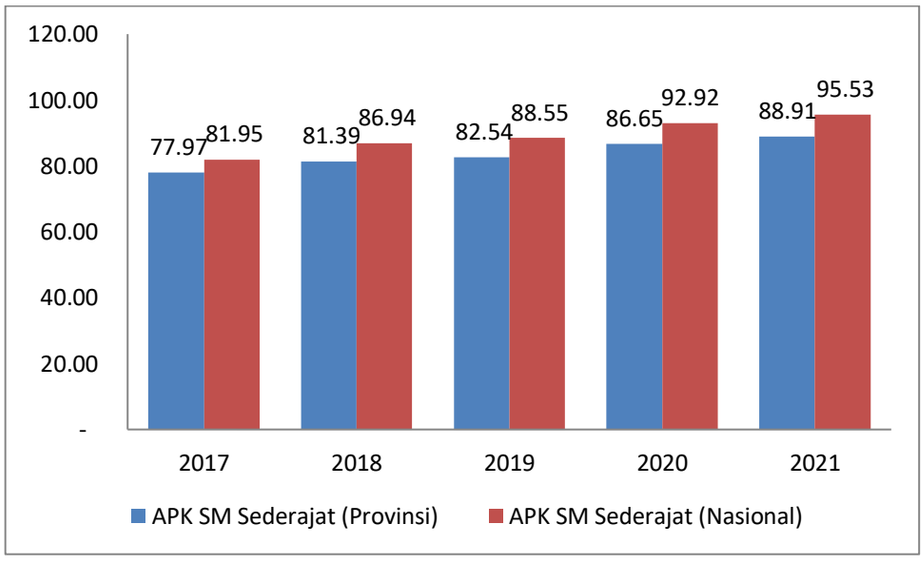
berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APK SM Sederajat (Provinsi)	77,97	81,39	82,54	86,65	88,91
APK SM Sederajat (Nasional)	81,95	86,94	88,55	92,92	95,53

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.7
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Kasar



Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APK SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2021.

2. APK SM Provinsi di tahun 2017 (77.97%) mengalami kenaikan sebesar 3,42%, dari tahun 2018 (81,39) APK SM Provinsi di tahun 2019 (82,54%) Mengalami kenaikan sebesar (4,11%) dari tahun 2020 (86,65%) dan APK SM Provinsi di tahun 2021 (88,91%) mengalami kenaikan sebesar (2,26%)
3. APK SM Nasional mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2021
4. APK SM Nasional tahun 2017 (81,95%) ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar (4,99%) ditahun 2019 (88,55%) mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar (4,37%) dan ditahun 2021 APK SM Nasional sebesar (95,53%)
5. Pada Tahun 2021 Rata –Rata APK SM Provinsi (88,91%) masih dibawah APK SM Nasional (95,53%) terdapat selisih (6,62%)

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

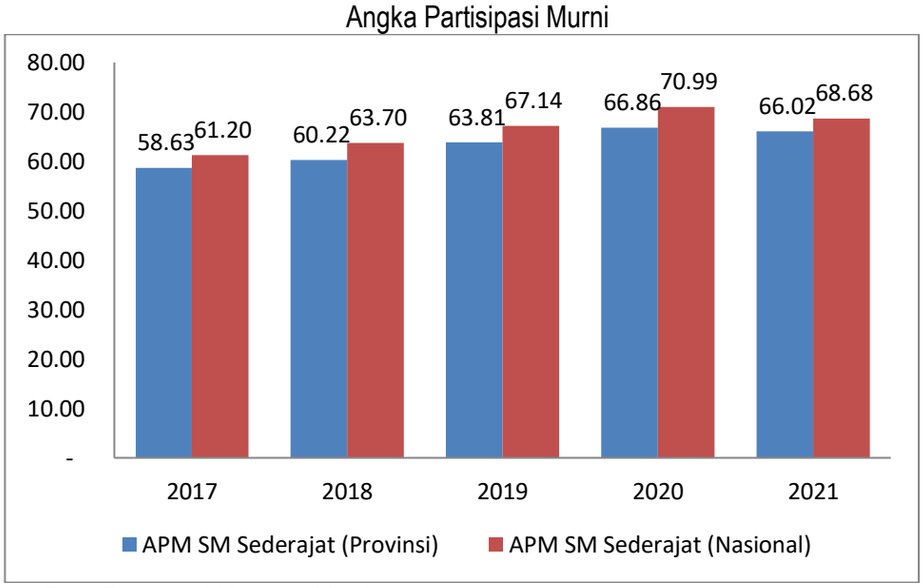
berikut tabel dan grafik trend capaian Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau dan nasional 5 tahun terakhir

Tabel 3.23
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Murni

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
APM SM Sederajat (Provinsi)	58,63	60,22	63,81	66,86	66,02
APM SM Sederajat (Nasional)	61,20	63,70	67,14	70,99	68,68

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.8
Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Angka Partisipasi Murni



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut mengambarkan hal – hal sebagai berikut:

1. APM SM sederajat baik Provinsi maupun Nasional Mengalami Kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021.
2. APM SM Provinsi di tahun 2017 (58.63%) mengalami kenaikan sebesar (1,59%), dari tahun 2018 (60,22) APM SM Provinsi di tahun 2019 (63,81%) Mengalami kenaikan sebesar (3,05%) dari tahun 2020 (66,86%) dan APM SM Provinsi di tahun 2021 (60,62%) mengalami Penurunan sebesar (-6,24%)
3. APM SM Nasional mengalami Penurunan di tahun 2021
4. APK SM Nasional tahun 2017 (61,20%) ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar (2,50%) ditahun 2019 (67,14%) mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar (3,85%) dan ditahun 2021 APK SM Nasional sebesar (68,68%)
5. Pada Tahun 2021 Rata –Rata APM SM Provinsi (66,02%) masih dibawah APM SM Nasional (68,68%) terdapat selisih (2,66%)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.5.1 INDIKATOR 1 dan 2 : APK dan APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan SLB
2. Masih Banyaknya Sarana Prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak pada Pendidikan Menengah dan SLB
3. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya,

dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.

4. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.
5. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah.

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan menambah Ruang Kelas Baru (RKB)
2. Merehabilitasi Ruang Kelas yang rusak
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB)
4. Pemenuhan akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran
5. Meningkatkan perolehan penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat

3.1.5.2 INDIKATOR 3 : Angka Putus Sekolah

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Faktor Ekonomi

   Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak dan membuat anak memilih untuk bekerja.

2. Pernikahan Usia Muda

   Pada tahun 2021 proses pembelajaran secara daring menyebabkan minat anak untuk belajar berkurang dan sering berada di luar rumah,

sehingga kurang kontrol dari orang tua dan banyak terjadi pergaulan bebas.

3. Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai

   Fasilitas pembelajaran di sekolah yang kurang memadai seperti fasilitas yang tersedia (alat, bahan dan media), buku pelajaran dan sebagainya merupakan faktor ketiga penyebab anak putus sekolah. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

4. Kurang perhatian orang tua

   Kurangnya perhatian orang tua merupakan faktor kedua penyebab anak putus sekolah. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua anak, sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5. Minat anak

   Rendahnya Minat Anak dapat di sebabkan Oleh Perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang Jauh, Fasilitas belajar yang kurang dan Pengaruh Lingkungan Sekitarnya. Tingkat Pendidikan Masyarakat Rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

6. Budaya

   Budaya adalah hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya arti pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa sekolahpun anak-anak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak, maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Pandangan banyak anak banyak rejeki membuat masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.

7. Lokasi Sekolah

   Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses

yang sulit merupakan hal hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh, akses yang sangat sulit dan keselamatan pun dianggap perlu dipertimbangkan.

8. **Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau**
   1. Memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan optimalisasi dalam penggunaannya dengan kebijakan tidak ada pungutan oleh sekolah kepada siswa
   2. Pemberian bantuan bagi siswa miskin (BSM) dan komunitas adat terpencil (KAT) untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa untuk bersekolah
   3. Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka) berupa penambahan jumlah Tempat Kegiatan Belajar (TKB), sehingga anak-anak yang menjadi tulang punggung keluarga dan jarak sekolah yang jauh karena factor geofrafis tetap bisa belajar karena menggunakan pelayanan khusus.
   4. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan secara tatap muka terbatas.

3.1.3.1 INDIKATOR 4 : Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Masih adanya Kualifikasi Guru dibawah D-IV / S-1
2. Rendahnya Kualitas / Kompetensi Pendidik

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui peningkatan pendidikan minimal D4/S1 dan beasiswa pendidikan melalui S2

2. Meningkatkan kompetensi pendidik melalui studi lanjut, misalnya berupa pendidikan dan pelatihan, penataran, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), seminar, dan kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti Penilaian Kinerja Guru (PKG)

3.1.3.2 INDIKATOR 5 dan 6 : Persentase Sekolah SMA dan SMK yang berakreditasi minimal B

A. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Penguatan kelembagaan atau satuan pendidikan oleh Pengawas Pendidikan.

B. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Banyak sekolah/madrasah di daerah terpencil yang belum siap untuk diakreditasi.
2. Partisipasi pengelola program/lembaga pendidikan masih rendah karena belum melihat kepentingan (*urgency*) akreditasi sekolah dan belum jelas *civil effect*-nya.
3. Sinergi antara BAN Sekolah Madrasah, BAP sebagai lembaga akreditasi/penjaminan mutu dengan Dinas Pendidikan belum optimal.
4. Keterlambatan penyelesaian administrasi akreditasi dari satuan pendidikan.
5. Masa berlakunya Akreditasi yang sudah habis, tetapi belum diakreditasi kembali oleh BAN-SM
6. Kompetensi staf pada tingkat satuan pendidikan dalam membuat evaluasi diri sekolah (EDS) masih kurang
7. Kemampuan sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan masih kurang

C. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Mengusahakan keberlangsungan dukungan dana dari APBD Provinsi dan pihak terkait lainnya untuk membantu sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan.

2. Menyusun jadwal dan rencana kegiatan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait Program/kegiatan akreditasi
3. Meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh unit terkait di propinsi dan kabupaten/kota mengenai pentingnya penjaminan mutu pendidikan melalui akreditasi sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
4. Meningkatkan koordinasi untuk bersinergi antara BAN S/M dengan Dinas Pendidikan provinsi untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 SNP, terutama dalam meningkatkan:
   a. Kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan
   b. Kemampuan sekolah dalam pengorganisasian program sekolah
   c. Kemampuan Tim Pengembang Sekolah
   d. Kemampuan Sekolah dalam Pengembangan nuansa akademik
   e. Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Akademik
   f. Kemampuan Sekolah dalam Pencapaian Prestasi Non Akademik
   g. Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Nilai- Nilai Karakter
   h. Kemampuan Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Sekolah.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Tabel 3.24
Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3		4	5	6=5/4x100%	7	8	9=8/7*100%
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56	88,91	103,92	299.032.297.469	241.033.078.260	80,60
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48	299.032.297.469	241.033.078.260	80,60
		3	Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38	937.194.687.819	886.946.002.851	94,64
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96,00	100,06	11.499.997.556	10.496.009.573	91,27
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,83	86,68	104,65	151.137.832.382	128.154.767.366	84,79
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi	55,03	81,43	147,97	135.018.052.053	108.189.119.754	80,13

			minimal B						

Tabel 3.25
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6=4-5
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	103,92	80,60	23,32
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	105,48	80,60	24,88
		3	Angka Putus Sekolah	106,38	94,64	11,74
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	100,06	91,27	8,79
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	104,65	84,79	19,86
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	147,97	80,13	67,84

Dari 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditentukan, yang mendukung adalah Program Pengelolaan Pendidikan yaitu APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C, Angka Putus Sekolah, Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B dan Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B. Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1.

Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, semua indikator kinerja dapat mencapai ≥ 100%. Bila dibandingkan antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran, maka untuk tingkat efisiensi tertinggi diperoleh dari indikator Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B yang tingkat efisiensi mencapai 67,84%.

3.1.1 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.26
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Program /Kegiatan	Anggaran		
							Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=5/4x100 %	7	8	9	10=9/8x100 %
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1 APK SMA/MA/ SMK/ SMLB/ Paket C	85,56	88,91	103,92	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**299.032.297.469**	**241.033.078.260**	**80,60**
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA	151.137.832.382	128.154.767.366	84,79
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK	135.018.052.053	108.189.119.754	80,13
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.876.413.034	4.689.191.140	36,42
		2 APM SMA/MA/SMK / SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**299.032.297.469**	**241.033.078.260**	**80,60**
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA	151.137.832.382	128.154.767.366	84,79
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK	135.018.052.053	108.189.119.754	80,13
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.876.413.034	4.689.191.140	36,42
		1 Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**937.194.687.819**	**886.946.002.851**	**94,64**
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA (Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS)	609.418.655.781	573.671.406.420	94,13
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK (Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS)	296.703.390.402	283.510.130.175	95,55
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS dan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik/SMATER)	31.072.641.636	29.764.466.256	95,79
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96,00	100,06	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**11.499.997.556**	**10.496.009.573**	**91,27**
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA (Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas)	4.131.941.327	3.953.810.173	95,69
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK (Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan)	650.644.746	446.969.200	68,70
						Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus (Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Khusus)	6.717.411.483	6.095.230.200	90,74

3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,83	86,68	104,65	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**151.137.832.382**	**128.154.767.366**	**84,79**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA	151.137.832.382	128.154.767.366	84,79
		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,03	81,43	147,97	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**135.018.052.053**	**108.189.119.754**	**80,13**
							Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMK	135.018.052.053	108.189.119.754	80,13

Dari tabel 3.24 diatas dapat dijelaskan bahwa Pada Indikator APK SMA/MA/ SMK/ SMLB/ Paket C penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 80,60%. Pada Indikator APM SMA/MA/ SMK/ SMLB/ Paket C penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 80,60%. Pada Indikator Angka Putus Sekolah penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 94,64%. Pada Indikator guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1 penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 91,27%. Pada Indikator Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 84,79%. Pada Indikator Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B penyerapan anggaran Program Pengelolaan Pendidikan dengan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMA, Pengelolaan Pendidikan SMK, Pengelolaan Pendidikan Khusus sebesar 80,13%. Hal ini disebabkan Penyerapan Anggaran terdapat efisiensi Dana, adanya kegiatan yang putus kontrak yaitu pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Lokasi SMAN 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir (14,73%), Adanya Kegiatan gagal lelang yaitu Kegiatan Pengadaan Alat Praktek Jurusan TKRO Lokasi SMKN 1 Sabak Auh Kabupaten Siak (DAK), Adanya Kegiatan yang tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan merupakan SILPA DAK Tahun lalu yang masuk di dalam Perubahan Anggaran 2021. (Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik

SMK dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan Labor IPA dan Peralatan TIK SMA).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2020 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD). Berikut Realisasi Anggaran dan penjelasannya :

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terbagi 2 (dua) bagian terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2020 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan. Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2021 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Riau. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2021 dengan total realisasi jumlah belanja tidak langsung sebesar **Rp. 982.011.856.456,-** dan realisasi jumlah anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.079.933.516.634**,- dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.27

Realisasi Keuangan dan Fisik
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.066.474.844.462**	**1.054.859.459.664**	**98,91**	**100**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**1.241.009.571.361**	**1.139.101.125.830**	**91,79**	**98,41**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**2.163.528.298**	**1.913.361.284**	**88,44**	100
	CABANG DINAS WILAYAH I	537.467.979	448.873.363	83,52	100
	CABANG DINAS WILAYAH II	536.799.303	453.055.711	84,40	100
	CABANG DINAS WILAYAH III	553.202.345	492.868.188	89,09	100
	CABANG DINAS WILAYAH IV	536.058.671	518.564.022	96,74	100
TOTAL		**2.309.647.944.121**	**2.195.873.946.778**	**93,05**	**99,47**

Adapun penjelasan mengenai Realisasi anggaran, sebagai berikut :

1. Terdapat efisiensi dana;
2. Adanya Kegiatan yang putus kontrak yaitu pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Lokasi SMAN 1 Concong Kabupaten Indragiri Hilir (14,73%).

3. Adanya Kegiatan gagal lelang yaitu Kegiatan Pengadaan Alat Praktek Jurusan TKRO Lokasi SMKN 1 Sabak Auh Kabupaten Siak (DAK).
4. Adanya Kegiatan yang tidak terlaksana karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan merupakan SILPA DAK Tahun lalu yang masuk di dalam Perubahan Anggaran 2021. (Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik SMK dan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Pendidikan Labor IPA dan Peralatan TIK SMA)

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran ini antara lain :

1. Menyusun aturan pola pelaksanaan kegiatan dengan mewajibkan kepada setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pada triwulan lebih awal, kecuali kegiatan-kegiatan yang dengan jadwal/kalender event nasional.
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.
4. Percepatan penyiapan dokumen lelang dan memasukkan penyedia ke dalam daftar hitam.
5. Melakukan percepatan penyiapan Dokumen untuk menghindari gagal lelang
6. Melakukan Proses Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai jadwal

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan *(stakeholders)* di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2021 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Kineja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	1	APK SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	85,56	88,91	103,92
		2	APM SMA/MA/SMK/ SMLB/Paket C	62,59	66,02	105,48
		3	Angka Putus Sekolah	1	0,94	106,38
2	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1	95,94	96,00	100,06
3	Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan serta peningkatan mutu siswa/peserta didik	1	Persentase Sekolah SMA yang berakreditasi minimal B	82,83	86,68	104,65

		2	Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B	55,03	81,43	147,97

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2021 yang diukur berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dan 6 (enam) indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat tercapai sebesar **≥ 100%**, sehingga capaian kinerja dikategorikan "**sangat tinggi**".

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2021 adalah sebesar 93,05**%,** dengan kategori sangat tinggi. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2021 atau tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2019-2024, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah Masih adanya kesenjangan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dikarenakan keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesulitan menjangkau lokasi pendidikan, Adanya Kesenjangan Jumlah Siswa akibat adanya Sistem Zonasi, Sulitnya pembangunan bangunan Sekolah pada daerah-daerah terpencil dan terbatasnya jumlah siswa yang bersekolah di Daerah Terpencil, Masih rendahnya Jumlah Tenaga Pendidik di Daerah-Daerah Terpencil. Solusi yang akan dilakukan di tahun depan untuk mengatasi kendala/permasalahan yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan penyelenggaraan Sekolah Jarak Jauh (SMA Terbuka), Penambahan Ruang Kelas Baru dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Sistem Zonasi, Pemenuhan Akses Pendidikan agar menjadi prioritas dalam pelaksanaan anggaran, Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik.

4.2 LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk pemenuhan Akses Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan, Peningkatan partisipasi sekolah dengan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin yang tidak mampu, Peningkatan mutu/ kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik

sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan ketercapaian tersebut diharapkan Misi Gubernur Riau yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya dan Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun dapat terealisasi.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								
	1		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**1,267,719,276**	**998.139.287**	**78.74%**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen 12 Bulan	1 dokumen 12 Bulan	100.00%	499,184,749	394.981.435	79.13%
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Orang	13 Orang	100.00%	768,534,527	603.157.852	78.48%
	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan sarana Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**94.60%**	**94.60%**	**1,051,895,858,802**	**1.042.686.505.352**	**99.12%**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.996 orang	7.564 Orang	94.60%	1,051,895,858,802	1.042.686.505.352	99.12%
	3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**460,275,000**	**258.516.750**	**56.17%**
		1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Indikator	1 Indikator	100.00%	460,275,000	258.516.750	56.17%
	4		**Administrasi Umum Perangkat Daerah 'Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**84.40%**	**60.29%**	**4,009,847,179**	**3.220.680.943**	**80.32%**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 jenis	9 jenis	100.00%	89,998,552	88.799.700	98.67%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 jenis	14 jenis	58.33%	2,483,001,116	2.187.249.800	88.09%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.261 porsi	6.232 porsi	75.44%	209,872,000	168.220.000	80.15%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37 jenis	15 jenis	88.24%	140,627,511	92.642.900	65.88%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365 kali	365 Kali	100.00%	1,086,348,000	683.768.543	62.94%
	5		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**0.00%**	**0.00%**	**473,115,895**	**0**	**0.00%**
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17 unit 40 unit	0	0.00%	473,115,895	0,00	0.00%
	6		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**81.66%**	**81.66%**	**7,116,097,403**	**6.576.201.557**	**92.41%**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	378 surat	170 Surat	44.97%	24,180,000	10.000.000	41.36%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	3 Rekening	100.00%	1,680,401,402	1.511.176.073	89.93%
	3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	5,411,516,001	5.055.025.484	93.41%
	7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**81.31%**	**81.32%**	**1,251,930,907**	**1.119.415.774,94**	**89.42%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 unit 5 unit	2 unit 5 unit	58.34%	239,860,000	232.456.702	96.91%
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	8 unit	100.00%	110,402,600	104.221.397	94.40%
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133 unit	89 unit	66.92%	127,880,000	110.880.000	86.71%
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 ruang	15 ruang	100.00%	773,788,307	671.857.675,94	86.71%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
	1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**Indikator : Akreditasi Sekolah SMA Sederajat Nilai Minimal B APK SMA Sederajat**	**83,03 %**	**86,68 %**	**86.14%**	**764,688,429,490**	**705.779.983.959,30**	**92.48%**
		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	1 Sekolah	1 Sekolah	100.00%	2,731,286,155	2.696.655.205,02	98.73%
		2	Penambahan Ruang Kelas Baru	144 ruang	142 ruang	98.61%	39,924,219,930	39.121.213.027,34	97.99%
		3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	39 Ruang	36 Ruang	92.31%	10,818,072,110	9.501.388.900,61	87.83%
		4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	22 Ruang	19 Ruang	86.36%	9,363,259,740	7.804.354.601,75	83.35%
		5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	22 Ruang	21 Ruang	95.45%	9,759,516,115	8.326.060.591,52	85.31%
		6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	15 Ruang	14 Ruang	93.33%	6,597,016,210	5.365.520.093,33	81.33%
		7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	16 Ruang	15 Ruang	93.75%	4,037,860,140	3.649.246.606,96	90.38%
		8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	6 Ruang	5 Ruang	83.33%	1,594,747,340	1.242.161.036,64	77.89%
		9	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	19 Ruang	19 Ruang	100.00%	5,504,611,765	4.769.515.374,88	86.65%
		10	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	9 Ruang	9 Ruang	100.00%	3,052,072,471	2.810.416.080,03	92.08%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 sekolah	20 sekolah	100.00%	5,571,938,325	5.103.353.696,22	91.59%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	28 ruang	28 ruang	100.00%	6,211,666,960	5.986.036.573	96.37%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		13	Pengadaan Mebel Sekolah	217 Sekolah	217 Sekolah	100.00%	21,166,041,791	18.537.612.517	87.58%
		14	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	48 sekolah	7 Sekolah	14.89%	335,463,817	216.142.610	64.43%
		15	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	48 Unit	29 Unit	60.42%	11,765,951,930	4.399.556.642	37.39%
		16	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	57 orang	57 Orang	100.00%	898,500,000	230.500.000	25.65%
		17	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	250 siswa 450 siswa	250 siswa 450 siswa	100.00%	8,299,102,752	6.608.929.510	79.63%
		18	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9 kegiatan 2484 Orang	5 kegiatan 1760 Orang	63.21%	2,774,681,202	1.161.803.450	41.87%
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	390 orang 180 orang 40 orang 390 orang 323 orang 50 orang	0 orang 108 orang orang 92 orang 72 orang orang 94 orang orang	13.35%	4,131,941,327	3.953.810.173	95.69%
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2 dokumen 1200 pak	2 dokumen	100.00%	731,823,629	624.300.850	85.31%
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	302 sekolah	302 sekolah	100.00%	283,278,976,781	251.134.496.095	88.65%
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	302 sekolah	302 sekolah	100.00%	326,139,679,000	322.536.910.325	98.90%
	1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan** **Indikator : Akreditasi Sekolah SMA Sederajat Nilai Minimal B**		**71.51 %**	**86,68 %**	**73.99%**	**432,372,087,201**	**392.146,219,129,23**	**90.70%**
		1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	12 Ruang	6 Ruang	50.00%	3,261,412,262	3.232.334.005,75	99.11%
		2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	20 Ruang	20 Ruang	100.00%	26,370,832,878	21.554.100.429,49	81.73%
		3	Pembangunan Ruang Laboratorium	35 Ruang	35 Ruang	100.00%	14,464,636,459	12.060.527.433,79	83.38%
		4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	100.00%	1,000,236,828	983.035.240	98.28%
		5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	8 Ruang	8 Ruang	100.00%	3,242,563,390	2.836.205.462,20	87.47%
		6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15 sekolah	15 sekolah	100.00%	3,678,332,937	3.323.801.225	90.36%
		7	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	5 Ruang	5 Ruang	100.00%	794,069,954	776.847.040	97.83%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	5 Ruang	42 Ruang	84.00%	6,091,778,173	5.712.824.410	93.78%
		9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3 Unit	-	0.00%	999,996	0.00	0.00%
		10	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	42 Unit	42 Unit	100.00%	65,948,182,987	50.309.042.549	76.29%
		11	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8 sekolah	3 sekolah	37.50%	2,259,550,000	2,222,704,470.00	98.37%
		12	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	450 siswa 165 siswa 200 siswa 65 siswa 60 orang 12 kab/kota	200 siswa 126 siswa - siswa - siswa - orang 12 kab/kota	36.30%	7,784,365,397	5.091.885.537	65.41%
		13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	12 Kompetensi Keahlian	-	0.00%	50,000,000	42.874.000	85.75%
		14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	96 orang	48 orang	50.00%	650,644,746	446.969.200	68.70%
		15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	71,090,792	42.938.042	60.40%
		16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	125 Sekolah	125 Sekolah	100.00%	180,301,990,402	170.278.635.599	94.44%
		17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	169 Sekolah	169 Sekolah	100.00%	116,401,400,000	113,231,494,576	97.28%
	2	**Pengelolaan Pendidikan Khusus** **Indikator : Akreditasi Sekolah SMA Sederajat Nilai Minimal B** **APK SMA Sederajat** **APM SMA Sederajat** **Persentase Anak Berkebutuhan**		**83,03 %** **85,86 %** **71,51 %**	**86,68 %** **88,91 %** **66,02 %**	**86.32%**	**43,949,054,670**	**40.548,887,596,39**	**92.26%**
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 sekolah	1 sekolah	100.00%	415,853,842	397,213,036.12	95.52%
		2	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	2 Ruang	1 Ruang	50.00%	454,162,605	88,035,121.96	19.38%
		3	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	100.00%	104,255,125	103,104,518.38	98.90%
		4	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	100.00%	134,281,025	132,958,992.38	99.02%
		5	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	100.00%	555,758,983	375.171.186,35	67.51%
		6	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	1 Ruang	-	0.00%	486,003,036	0.00	0.00%
		7	Pengadaan Mebel Sekolah	5 sekolah	5 sekolah	100.00%	579,758,051	524.640.690	90.49%
		8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4 Unit	4 Unit	100.00%	19,999,864	18.605.744	93.03%
		9	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	9 Sekolah	9 Sekolah	100.00%	909,584,672	845.437.900	92.95%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1475 siswa	1475 siswa	100.00%	12,414,657,786	11.225.902.776,20	90.42%
		11	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44 lcabang lomba 150 siswa	33 cabang lomba 150 siswa	87.50%	2,451,944,578	2.175.895.951	88.74%
		12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	228 orang 251 orang 655 orang	133 orang 180 orang 273 orang	57.24%	6,717,411,483	6.095.230.200	90.74%
		13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	47,399,770	28.118.000	59.32%
		14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	17 Sekolah	17 Sekolah	100.00%	13,978,583,850	13.880.507.480	99.30%
		15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	45 Sekolah	45 Sekolah	100.00%	4,679,400,000	4.658,056,000	99.54%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	CABANG DINAS WILAYAH I								
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah** **Indikator : 'Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**288,472,351**	**224.827.250**	**77.94%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	34 jenis	100.00%	78,498,513	74.819.500	95.31%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2172 porsi	2172 porsi	100.00%	36,800,000	74.819.500	86.96%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100.00%	13,783,838	11.940.000	86.62%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	100.00%	159,390,000	106.067.750	66.55%
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** **Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**166,200,628**	**141.251.113**	**84.99%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	3 rekening	100.00%	27,000,628	12.531.113	46.41%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	139,200,000	128.720.000	92.47%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**82,795,000**	**82.795.000**	**96.21%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100.00%	34,795,000	34.795.000	96.49%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 ruang	1 ruang	100.00%	48,000,000	48.000.000	96.00%
	CABANG DINAS WILAYAH II								
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : 'Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**309,520,481**	**230.510.981**	**74.47%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 jenis	42 jenis	100.00%	56,263,965	56.263.965	100.00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 porsi	400 porsi	100.00%	18,400,000	18.400.000	100.00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100.00%	26,106,516	26.106.516	100.00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107 kali	107 kali	100.00%	208,750,000	129.740.500	62.15%
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**137,792,615**	**133.960.344**	**97.22%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 rekening	2 rekening	100.00%	12,992,615	11.560.344	62.15%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	124,800,000	122,400,000.00	98.08%
	3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**89,486,207**	**88.584.386**	**98.99%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100.00%	39,486,207	38.584.386	97.72%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 ruang	1 ruang	100.00%	50,000,000	38.584.386	100.00%
	CABANG DINAS WILAYAH III								
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : 'Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**311,072,345**	**267.102.411**	**85.87%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 jenis	55 jenis	100.00%	60,559,659	59.798.755	98.74%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1224 porsi	1224 porsi	100.00%	33,082,996	28.100.996	98.74%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 jenis	4 jenis	100.00%	34,129,690	32.244.062	94.48%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	100.00%	183,300,000	146.958.598	94.48%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**159,070,000**	**142.705.777**	**89.71%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	3 rekening	100.00%	28,270,000	15.985.777	56.55%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	130,800,000	126.720.000	96.88%
	3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**83,060,000**	**83,060,000**	**99.40%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100.00%	33,060,000	33.440.000	98.51%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 ruang	1 ruang	100.00%	50,000,000	50.000.000	100.00%
	CABANG DINAS WILAYAH IV								
	1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator : 'Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**294,577,161**	**294.414.911**	**99.94%**
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 jenis	36 jenis	100.00%	63,010,555	63.010.555	100.00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500 porsi	500 porsi	100.00%	23,000,000	23.000.000	100.00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	2 jenis	100.00%	22,226,606	22.226.606	100.00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 kali	103 kali	100.00%	186,340,000	186.177.750	99.91%
	2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**145,786,060**	**139.950.611**	**96.00%**
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	3 rekening	100.00%	19,786,060	14.750.611	74.55%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100.00%	126,000,000	125.200.000	99.37%
	3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Indikator : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan**		**100%**	**100%**	**100.00%**	**95,695,450**	**84.198.500**	**87.99%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	100.00%	45,695,450	34.198.500	74.84%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 ruang	1 ruang	100.00%	50,000,000	50.000.000	100.00%